

Representasi dan Substansi: Analisis Kritis Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Provinsi Nusa Tenggara Barat

Representation and Substance: A Critical Analysis of Women's Involvement in the West Nusa Tenggara Provincial Parliament

Baiq Mela Hilma Yunita 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks pembangunan gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana perbaikan indikator kesetaraan – khususnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) – tidak diikuti peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen daerah. Permasalahan penelitian terletak pada kesenjangan konversi antara capaian pembangunan gender dan representasi politik elektoral perempuan. Kesenjangan riset muncul karena sebagian besar studi terdahulu berfokus pada dinamika nasional, pra-elektoral, dan belum mengintegrasikan indikator makro pembangunan gender dengan representasi legislatif lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika perkembangan IKG dan tren keterwakilan perempuan DPRD kabupaten/kota di NTB periode 2019–2023, sekaligus mengidentifikasi disparitas dan struktur peluang politiknya. Kerangka teori memadukan teori representasi politik (deskriptif–substansif), parlemen sebagai gendered workplace, teori rekrutmen politik, serta perspektif gender and development. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis data sekunder BPS dan komposisi legislatif daerah. Teknik analisis meliputi statistik deskriptif–komparatif, tabulasi longitudinal, serta pengukuran laju pertumbuhan menggunakan Compound Annual Growth Rate (CAGR). Hasil penelitian menunjukkan IKG NTB mengalami perbaikan agregatif namun tidak merata, dengan akselerasi tertinggi di Kabupaten Sumbawa, sementara beberapa wilayah stagnan bahkan meningkat. Sebaliknya, keterwakilan perempuan legislatif cenderung stagnan di mayoritas daerah. Sintesis temuan mengungkap disparitas konversi pembangunan gender terhadap representasi politik akibat mediasi struktural partai, budaya patriarki, patronasi politik, dan hambatan institusional parlemen. Kesimpulan menegaskan bahwa kesetaraan gender di NTB masih berada pada fase developmental equality dan belum mencapai political equality. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data kuantitatif sekunder dan belum mengukur kualitas representasi substansif. Rekomendasi diarahkan pada reformasi rekrutmen partai, afirmasi elektoral strategis, penguatan kaderisasi perempuan, serta integrasi pemberdayaan sosial dengan transformasi institusional politik.

DOI

[10.63892/aletheia.3.2026.1-13](https://doi.org/10.63892/aletheia.3.2026.1-13)

Tanggal Diajukan

20 Januari 2026

Tanggal Diterima

17 February 2026

Tanggal Diterbitkan

3 Juni 2026

Penulis Korespondensi

Baiq Mela Hilma Yunita
baiqmella149@gmail.com

© Penulis 2026



Karya ini dilisensikan di bawah lisensi CC BY-NC-SA 4.0. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Kata Kunci

Ketimpangan Gender; Keterwakilan Perempuan; Parlemen Daerah; Politik Gender; Nusa Tenggara Barat.

Abstract

This study is motivated by the gender development paradox in West Nusa Tenggara (NTB) Province, where improvements in gender equality indicators—particularly the Gender Inequality Index (GII)—have not been followed by increased women’s representation in local parliaments. The research problem lies in the conversion gap between gender development achievements and women’s electoral political representation. The research gap emerges as prior studies largely focus on national and pre-electoral dynamics and rarely integrate macro gender development indicators with local legislative representation. This study aims to analyze the dynamics of GII development and trends in women’s representation in district and municipal parliaments in NTB during 2019–2023, while identifying disparities and structural political opportunity patterns. The theoretical framework integrates political representation theory (descriptive–substantive), parliament as a gendered workplace, political recruitment theory, and the gender and development perspective. A descriptive quantitative approach was employed using secondary data from the Statistics Bureau and legislative composition records. Analytical techniques include descriptive-comparative statistics, longitudinal tabulation, and Compound Annual Growth Rate (CAGR) measurement. Findings reveal that NTB’s GII improved aggregately but unevenly, with the most progressive decline in Sumbawa, while several regions stagnated or worsened. In contrast, women’s legislative representation remained largely stagnant. The synthesis highlights a disparity between development and representation conversion mediated by party structures, patriarchal culture, political patronage, and institutional parliamentary barriers. The study concludes that gender equality in NTB remains at the stage of developmental equality and has not yet reached political equality. Limitations include reliance on secondary quantitative data and the absence of substantive representation measurement. Recommendations emphasize party recruitment reform, strategic electoral affirmative action, strengthening women’s political cadreization, and integrating social empowerment with institutional political transformation.

Keywords

Gender Inequality; Women’s Representation; Local Parliament; Gender Politics; West Nusa Tenggara.

1. Pendahuluan

Prinsip demokrasi modern menempatkan keterwakilan politik sebagai instrumen utama dalam menjamin inklusivitas, keadilan deliberatif, serta distribusi kepentingan publik yang setara. Dalam kerangka tersebut, keterlibatan perempuan di lembaga legislatif bukan sekadar indikator prosedural, melainkan refleksi kualitas demokrasi substantif. Namun, realitas di tingkat lokal Indonesia – termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) – menunjukkan bahwa peningkatan indikator pembangunan gender belum sepenuhnya terkonversi menjadi penguatan posisi politik perempuan di parlemen daerah.

Studi mengenai keterwakilan perempuan di Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan elektoral perempuan sangat dipengaruhi oleh struktur rekrutmen partai, jaringan patronasi, serta distribusi sumber daya politik yang masih bias gender (Halimatusa'diyah & Jannah, 2025). Dalam konteks elektoral lokal, hambatan tersebut diperkuat oleh norma patriarki, segmentasi wilayah pemilihan, serta praktik pencalonan simbolik untuk memenuhi kuota administratif semata (Nasrudin & Yandi 2025). Akibatnya, meskipun regulasi afirmatif 30% keterwakilan perempuan telah diadopsi, capaian kursi legislatif perempuan di banyak daerah tetap berada jauh di bawah ambang ideal (Terjesen dkk., 2015).

Kondisi tersebut juga tercermin di Provinsi NTB. Data pemilu legislatif daerah menunjukkan fluktuasi namun cenderung stagnan dalam proporsi perempuan terpilih, mengindikasikan adanya hambatan struktural yang belum terselesaikan (Aulia dkk., 2025). Dominasi maskulinitas politik lokal tidak hanya berdampak pada rendahnya angka representasi, tetapi juga membentuk kultur kelembagaan yang kurang inklusif terhadap kepemimpinan perempuan (Erikson & Josefsson, 2022).

Permasalahan utama tidak berhenti pada rendahnya representasi numerik, melainkan pada paradoks pembangunan gender: ketika indikator makro kesetaraan, seperti Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami perbaikan, keterlibatan perempuan dalam parlemen justru tidak meningkat secara linier. Padahal persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di Provinsi NTB turut menjadi salah satu variabel pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Kendati kajian mengenai politik gender dan keterwakilan perempuan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir, masih terdapat kesenjangan penelitian yang cukup mendasar, terutama dalam konteks wilayah periferi. Mayoritas studi cenderung berfokus pada dinamika nasional atau daerah urban di Pulau Jawa, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas sosial-politik di kawasan seperti NTB yang memiliki karakteristik kultural, religius, dan struktural berbeda (Syukri, 2023). Selain itu, literatur yang ada masih didominasi pendekatan pra-elektoral yang menitikberatkan pada hambatan pencalonan, kampanye, dan peluang keterpilihan perempuan, tanpa mengelaborasi secara memadai dampak pasca-keterpilihan terhadap kinerja legislasi maupun agenda kebijakan publik (Umagapi, 2020). Keterbatasan lain terletak pada minimnya integrasi antara indikator pembangunan gender makro (seperti IKG) dengan analisis representasi politik di tingkat daerah, padahal relasi keduanya penting untuk menjelaskan konversi capaian pembangunan menjadi kapital politik elektoral (Putri, 2025). Lebih jauh, studi yang menilai kehadiran perempuan dalam parlemen dalam kaitannya dengan substansi kebijakan, kualitas deliberasi, serta orientasi pembangunan responsif gender juga masih relatif terbatas (Blumenau, 2021). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut melalui analisis terpadu antara statistik ketimpangan gender dan dinamika keterwakilan perempuan legislatif di tingkat lokal.

Kerangka teori penelitian ini dibangun secara berlapis. Pada level *grand theory*, studi ini bertumpu pada teori representasi politik yang membedakan antara representasi deskriptif – yang menekankan jumlah kehadiran perempuan di parlemen – dan representasi substantif yang menilai sejauh mana kehadiran tersebut berpengaruh terhadap artikulasi kepentingan serta produksi kebijakan responsif gender (Rahmadani dkk., 2025). Parlemen dalam perspektif ini juga dipahami sebagai ruang kerja yang bergender (*gendered workplace*), dimana relasi kuasa, norma institusional, serta distribusi peran memengaruhi peluang dan efektivitas legislator

perempuan dalam menjalankan fungsi representasi (Erikson & Josefsson, 2022). Pada tataran *middle-range theory*, penelitian memanfaatkan teori partisipasi dan rekrutmen politik yang menempatkan sistem kaderisasi partai, jaringan organisasi perempuan, serta basis sosial kandidat sebagai determinan penting keterpilihan perempuan dalam politik elektoral (Dewi dkk., 2023), termasuk penguatan melalui partisipasi non-elektoral dan jejaring advokasi gender (Dewi dkk., 2025). Sementara itu, pada level *applied theory*, penelitian ini menggunakan perspektif *gender and development* yang menegaskan bahwa peningkatan kesetaraan gender, baik dalam akses pendidikan, ekonomi, maupun pengambilan keputusan yang merupakan prasyarat bagi lahirnya kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Satrio & Sabilla, 2021). Dengan demikian, integrasi ketiga lapisan teori tersebut menjadi fondasi analitis untuk membaca keterkaitan antara dinamika ketimpangan gender dan realitas keterwakilan perempuan dalam struktur legislatif daerah.

Bertolak dari kerangka permasalahan dan kesenjangan riset yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu: bagaimana dinamika perkembangan IKG dan tren keterwakilan Perempuan dalam parlemen daerah menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB periode 2019–2023. Sejalan dengan itu, penelitian ditujukan untuk menganalisis secara komprehensif perkembangan indikator ketimpangan gender antarwilayah sebagai refleksi capaian pembangunan berbasis kesetaraan, sekaligus mengkaji dinamika keterlibatan perempuan di lembaga legislatif daerah agar dapat diidentifikasi kecenderungan, disparitas, serta struktur peluang representasi politik perempuan di tingkat lokal.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dipilih secara argumentatif karena fokus utama studi terletak pada pengukuran, pemetaan, serta komparasi perkembangan indikator ketimpangan gender dan keterwakilan perempuan legislatif antarwilayah dalam suatu rentang waktu. Pendekatan kuantitatif memungkinkan pembacaan pola hubungan empiris berbasis data statistik secara objektif, terukur, dan longitudinal, khususnya dalam melihat dinamika pembangunan gender daerah. Secara metodologis, penggunaan statistik deskriptif relevan untuk menggambarkan distribusi, tren, dan disparitas indikator sosial-politik tanpa melakukan uji kausalitas inferensial (Khaddafi dkk., 2025). Pendekatan ini juga selaras dengan studi-studi pengukuran ketimpangan gender yang menempatkan indeks komposit sebagai instrumen utama evaluasi pembangunan dan pemberdayaan (Klasen & Schüler, 2011).

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB serta publikasi resmi mengenai keterwakilan perempuan di parlemen daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota – periode pengamatan 2019–2023. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu: (a) kesehatan reproduksi, (b) pemberdayaan, dan (c) partisipasi ekonomi. Nilai indeks berada pada rentang 0–1, dimana semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan semakin rendah, sedangkan semakin mendekati 1 menandakan ketimpangan semakin tinggi. Sementara itu, Persentase Keterwakilan Perempuan Legislatif mengukur proporsi jumlah anggota legislatif perempuan dibandingkan total anggota DPRD pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengukuran dinyatakan dalam persentase (%).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi statistik, publikasi ilmiah, dan laporan pembangunan daerah, serta rekapitulasi komposisi legislatif. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan tabulasi komparatif, klasifikasi wilayah, serta standardisasi satuan indikator agar dapat diperbandingkan secara longitudinal. Pengolahan data kuantitatif juga menggunakan teknik *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) untuk mengukur laju pertumbuhan rata-rata tahunan IKG dan keterwakilan perempuan legislatif kurun waktu 5 tahun, sehingga tren perubahan dapat dibaca secara geometris dan tidak bias fluktuasi tahunan (Khotimah dkk., 2025).

Teknik analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif-komparatif dan analisis tren pertumbuhan yang kemudian diinterpretasikan secara substantif dalam kerangka politik gender dan pembangunan daerah. Interpretasi tidak hanya berhenti pada pembacaan angka, tetapi juga mengaitkan temuan statistik dengan konteks struktural seperti akses pendidikan, ekonomi, budaya patriarki, dan peluang politik perempuan di daerah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dinamika Ketimpangan Gender: Tren Perbaikan, Disparitas Struktural, dan Polarisasi Wilayah

Perkembangan IKG menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB merefleksikan kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Analisis longitudinal (2019-2023) ditujukan untuk membaca arah perubahan, kecepatan reduksi ketimpangan, dan disparitas antarwilayah dalam pembangunan gender daerah. Tabulasi, komparasi nilai awal-akhir, serta laju perubahannya disajikan pada [Tabel 1](#).

Tabel 1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Kurun Waktu 2019–2023

Kabupaten/Kota	IKG Provinsi NTB (2019–2023)			Keterangan
	2019	2023	Laju (%)	
Kabupaten Lombok Barat	0,57	0,57	-0,22	Stagnasi ketimpangan mengindikasikan minimnya intervensi pembangunan gender
Kabupaten Lombok Tengah	0,62	0,60	-0,73	Penurunan lambat menunjukkan hambatan struktural persisten
Kabupaten Lombok Timur	0,61	0,58	-1,58	Perbaikan moderat namun masih di atas rata-rata provinsi
Kabupaten Sumbawa	0,50	0,35	-8,58	Akselerasi tertinggi mengindikasikan keberhasilan pembangunan inklusif
Kabupaten Dompu	0,60	0,53	-2,67	Penurunan progresif namun masih memerlukan penguatan akses perempuan
Kabupaten Bima	0,59	0,56	-1,17	Reduksi ketimpangan lambat menunjukkan persistensi norma patriarki
Kabupaten Sumbawa Barat	0,57	0,53	-1,82	Perbaikan moderat namun terkendala infrastruktur sosial
Kabupaten Lombok Utara	0,62	0,58	-1,57	Penurunan bertahap namun masih tinggi relatif terhadap wilayah lain
Kota Mataram	0,45	0,46	0,78	Paradoks perkotaan: modernisasi tidak menurunkan ketimpangan gender
Kota Bima	0,49	0,48	-0,15	Stagnasi relatif mengindikasikan lemahnya redistribusi peran gender
Nusa Tenggara Barat	0,67	0,65	-0,69	Perbaikan agregatif namun dengan disparitas kewilayahan signifikan

Sumber: Tabel Statistik: Gender dan Kelompok Populasi Khusus, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota, Data Tahun 2019–2023. BPS Provinsi NTB. Data Diolah. 2025.

Mencermati data longitudinal IKG menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB (2019–2023) memperlihatkan kecenderungan perbaikan agregatif, namun dengan intensitas yang tidak seragam antarwilayah. Penurunan ketimpangan paling progresif tercatat di Kabupaten Sumbawa dengan laju penurunan mencapai $-8,58\%$, menunjukkan akselerasi signifikan dalam dimensi kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi, maupun pemberdayaan. Pola ini mengindikasikan keberhasilan intervensi pembangunan berbasis kesetaraan yang lebih terintegrasi dibanding wilayah lain. Temuan tersebut sejalan dengan argumen bahwa penguatan kapasitas ekonomi dan akses pembangunan perempuan di daerah periferi mampu mempercepat reduksi ketimpangan gender secara struktural ([Gugan dkk., 2024](#); [Shenbei dkk., 2023](#)). Dalam konteks wilayah kepulauan, capaian ini mengindikasikan adanya mobilisasi sumber daya pembangunan yang lebih inklusif

terhadap perempuan, baik melalui program ekonomi produktif maupun investasi sosial dalam pendidikan dan kesehatan reproduksi.

Sebaliknya, beberapa wilayah memperlihatkan stagnasi relatif yang mengindikasikan hambatan struktural persisten, seperti Lombok Barat yang tidak menunjukkan perubahan berarti dengan laju penurunan hanya -0,22%, sementara Kota Mataram justru mengalami kenaikan tipis ketimpangan sebesar 0,78%. Fenomena ini menegaskan bahwa modernisasi ekonomi, ekspansi sektor jasa, dan perkembangan wilayah perkotaan tidak otomatis menurunkan ketimpangan gender, terutama ketika akses ekonomi perempuan tidak diikuti redistribusi peran domestik dan pengambilan keputusan publik (Apostu dkk., 2024). Dalam konteks ini, konstruksi sosial patriarki tetap menjadi variabel laten yang memoderasi capaian kesetaraan formal (Fitri, 2025; Nurseha & Arafat, 2024; Wijaya dkk., 2025). Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan gender di wilayah urban belum sepenuhnya transformatif, masih berkutat pada level akses tanpa mengubah relasi kuasa gender di ranah privat maupun publik.

Disparitas antarwilayah juga memperlihatkan diferensiasi struktural antara kawasan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dimana wilayah dengan basis ekonomi agraris dan kepulauan cenderung mengalami perlambatan reduksi ketimpangan akibat keterbatasan infrastruktur sosial, akses pendidikan perempuan, serta peluang kerja non-informal (Alexis dkk., 2020). Pola geografis ini sejalan dengan temuan bahwa kemajuan kesetaraan gender bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi konfigurasi ekonomi lokal serta aksesibilitas layanan dasar (Shenbei dkk., 2023). Lebih jauh, rendahnya mobilitas sosial perempuan di wilayah periferi juga diperparah oleh keterbatasan jejaring sosial, isolasi geografis, dan minimnya akses terhadap informasi pembangunan, yang secara kumulatif membentuk lingkaran kemiskinan gender (Tohari dkk., 2025).

Sementara itu, dalam studi (Aziz, 2023) dan (van der Ham dkk., 2021) disorot mengenai aspek krusial lainnya berupa korelasi antara beban ganda perempuan dan persistensi ketimpangan gender. Perempuan di wilayah dengan penurunan IKG yang lambat cenderung menghadapi peran domestik yang tidak terdistribusi secara adil, sehingga partisipasi ekonomi dan politik menjadi terkonstrain oleh keterbatasan waktu dan energi. Dinamika dan realitas ini turut berkontribusi dalam tataran teoretis yang memperkuat argumentasi Teori Darajat yang menekankan perlunya penyeimbangan beban ganda melalui redistribusi tanggung jawab reproduktif dan transformasi norma gender di tingkat rumah tangga (Sobri & Noviani, 2023). Tanpa intervensi pada level relasi domestik, pembangunan gender hanya akan berhasil di ranah formal tanpa menyentuh akar ketidaksetaraan struktural.

3.2. Dinamika Keterwakilan Perempuan di Parlemen Daerah NTB: Potret Stagnasi, Variasi, dan Ketimpangan Representasi

Keterwakilan perempuan dalam parlemen daerah di Provinsi NTB merupakan indikator representasi politik deskriptif dalam struktur legislatif. Analisis difokuskan pada persentase keterlibatan Perempuan dalam parlemen mulai 2019. Selain menyoroti posisi relatif tiap daerah, pembahasan juga diarahkan untuk mengidentifikasi pola stagnasi maupun ekspansi representasi sebagai dasar diagnosis struktural keterlibatan perempuan dalam kekuasaan legislatif. Distribusi persentase keterwakilan, perbandingan nilai awal-akhir, dan laju perubahannya disajikan pada Tabel 2.

Berbeda dengan tren perbaikan pembangunan gender, keterwakilan perempuan legislatif di NTB justru memperlihatkan pola stagnasi elektoral yang mengkhawatirkan. Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa mayoritas kabupaten/kota tidak mengalami perubahan sama sekali (laju 0,00%) selama periode pengamatan, mengindikasikan bahwa afirmasi kuota pencalonan 30% belum sepenuhnya terkonversi menjadi keterpilihan elektoral. Fenomena ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan kuota bersifat *necessary but not sufficient condition*, karena keberhasilan elektoral perempuan sangat dipengaruhi oleh posisi nomor urut strategis, dukungan logistik partai, serta akses pembiayaan kampanye yang setara (Neolaka dkk., 2024; Syahri dkk., 2025).

Tabel 2. Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Kurun Waktu 2019–2023

Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Provinsi NTB (2019–2023)			Keterangan
	2019	2023	Laju (%)	
Kabupaten Lombok Barat	8,89	11,11	5,73	Pertumbuhan positif mengindikasikan penguatan dukungan partai
Kabupaten Lombok Tengah	6,00	8,00	7,46	Akselerasi tertinggi namun angka absolut masih rendah
Kabupaten Lombok Timur	10,00	10,00	0,00	Stagnasi & ketiadaan pertumbuhan
Kabupaten Sumbawa	13,33	13,33	0,00	Paradoks: penurunan IKG tertinggi namun representasi stagnan
Kabupaten Dompu	10,00	10,00	0,00	Stagnasi & ketiadaan pertumbuhan
Kabupaten Bima	6,67	6,67	0,00	Stagnasi & ketiadaan pertumbuhan
Kabupaten Sumbawa Barat	8,00	8,00	0,00	Stagnasi & ketiadaan pertumbuhan
Kabupaten Lombok Utara	3,33	3,33	0,00	Stagnasi & ketiadaan pertumbuhan
Kota Mataram	25,00	25,00	0,00	Stagnasi & ketiadaan pertumbuhan
Kota Bima	16,00	16,67	1,03	Pertumbuhan marginal mengindikasikan perubahan inkremental lambat
Nusa Tenggara Barat	1,54	1,54	0,00	Stagnasi provinsi mencerminkan perlunya perbaikan konversi pembangunan gender

Sumber: Tabel Statistik: Gender dan Kelompok Populasi Khusus, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota, Data Tahun 2019–2023. BPS Provinsi NTB. Data Diolah. 2025.

Stagnasi ini juga mengindikasikan praktik pencalonan simbolik, dimana perempuan dicalonkan semata untuk memenuhi kuota administratif tanpa dukungan elektoral substantif (Kedu, 2023; Kuki, 2024).

Kota Mataram menempati posisi tertinggi dengan keterwakilan 25%, mencerminkan keterbukaan politik urban, tingkat pendidikan pemilih yang lebih tinggi, serta keberadaan jaringan advokasi perempuan yang lebih solid. Capaian ini sejalan dengan temuan bahwa wilayah dengan aksesibilitas informasi politik yang baik dan kultur deliberasi yang lebih terbuka cenderung memberikan peluang elektoral yang lebih besar bagi kandidat perempuan (Kadriyah, 2023). Sebaliknya, Lombok Utara mencatat angka terendah (3,33%), menunjukkan eksklusi elektoral yang tajam dan mengindikasikan dominasi struktur patriarki lokal yang masih sangat kuat. Ketimpangan ini menandakan bahwa peluang politik perempuan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial lokal, resistensi kultural, dan relasi kuasa informal yang tidak tersentuh regulasi afirmatif formal (Jovani, 2024). Hal tersebut konsisten dengan temuan Fraga dan Hassell (2021) bahwa partai politik masih menempatkan perempuan sebagai kandidat pelengkap administratif, bukan kandidat elektoral kompetitif.

Ketiadaan pertumbuhan di sebagian besar wilayah juga mengindikasikan lemahnya kaderisasi politik perempuan di tingkat partai. Tanpa *pipeline* kepemimpinan yang terstruktur, perempuan sulit menembus struktur kekuasaan legislatif yang telah terkonsolidasi secara maskulin (Kumari dkk., 2024). Dalam konteks ini, rekrutmen politik yang bias gender (maskulin) tetap menjadi penghambat utama representasi deskriptif perempuan, dimana partai politik masih menempatkan perempuan sebagai kandidat pelengkap administratif bukan kandidat elektoral kompetitif (Sijabat dkk., 2023). Lebih jauh, minimnya dukungan finansial dan infrastruktur kampanye terhadap kandidat perempuan memperparah kesenjangan elektabilitas, sehingga meskipun dicalonkan, perempuan menghadapi hambatan sistemik dalam mobilisasi pemilih (Yarchi & Samuel-Azran, 2018).

Aspek krusial lainnya adalah bahwa bahkan di wilayah dengan pertumbuhan positif seperti Lombok Tengah (7,46%), angka absolut keterwakilan masih sangat rendah (8%). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan persentase tidak serta-merta mengindikasikan tercapainya representasi yang memadai. Dalam perspektif representasi substantif, kehadiran perempuan yang minim di parlemen (DPRD Provinsi NTB) membatasi kapasitas artikulasi kepentingan gender dalam agenda legislasi dan penganggaran daerah (Höhmnn, 2020). Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan elektoral inkremental, *threshold* kritis untuk mempengaruhi kebijakan publik secara substantif (*critical mass*) belum tercapai.

3.3. Disparitas Konversi Pembangunan Gender terhadap Representasi Politik Perempuan di DPRD NTB

Paradoks fundamental dalam konversi pembangunan gender terhadap representasi politik perempuan terjadi di Provinsi NTB. Beberapa wilayah dengan penurunan ketimpangan gender yang signifikan justru tidak mengalami peningkatan keterwakilan legislatif sama sekali. Kabupaten Sumbawa, misalnya, mencatat penurunan IKG tertinggi (-8,58%) namun keterwakilan perempuan di DPRD stagnan di 13,33% tanpa pertumbuhan. Demikian pula Kabupaten Dompu yang mengalami penurunan IKG sebesar -2,67% namun keterwakilan perempuan tetap di angka 10% tanpa perubahan. Fenomena ini menegaskan bahwa pembangunan gender bersifat *necessary but not sufficient condition* bagi representasi politik, atau dengan kata lain, perbaikan indikator pembangunan tidak secara otomatis mentranslasikan diri menjadi kekuatan elektoral perempuan (Nemerever & Parry, 2023).

Relasi yang tidak linear tersebut mengindikasikan adanya variabel mediasi struktural yang menghambat konversi kapasitas sosial-ekonomi perempuan menjadi kapital politik elektoral. Variabel mediasi tersebut mencakup setidaknya lima dimensi krusial. Pertama, mekanisme seleksi kandidat di internal partai yang masih didominasi elite maskulin dan cenderung menempatkan perempuan pada posisi nomor urut tidak elektabel (Prihatini & Halimatusa'diyah, 2024). Kedua, patronasi politik dan jaringan kekuasaan informal yang membatasi akses perempuan terhadap sumber daya kampanye, *endorsement* elite lokal, serta dukungan logistik elektoral (Sudarsono, 2024). Ketiga, persistensi dinasti politik lokal yang menciptakan oligarki kekuasaan dan mempersempit ruang kompetisi bagi aktor politik baru termasuk perempuan (Hendrastiti, 2025). Keempat, budaya politik patriarkal yang masih menempatkan kepemimpinan politik sebagai domain maskulin, sehingga kandidat perempuan menghadapi bias elektoral di tingkat pemilih (Lombard dkk., 2021). Kelima, lemahnya jejaring advokasi dan organisasi perempuan di tingkat lokal yang seharusnya berfungsi sebagai basis mobilisasi elektoral perempuan (Rohmawati, 2020). Studi politik lokal Indonesia menunjukkan bahwa akses perempuan ke parlemen sangat dipengaruhi jaringan kekuasaan informal dan struktur elite partai (Bayo, 2021).

Selain itu, parlemen sebagai ruang kerja bergender (*gendered workplace*) menciptakan hambatan institusional pascaketerpilihan yang membatasi efektivitas representasi perempuan. Distribusi komisi legislatif seringkali menempatkan perempuan pada bidang yang dianggap 'feminin' seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan, sementara komisi strategis seperti anggaran, pembangunan infrastruktur, dan ekonomi tetap didominasi legislator laki-laki (Ahrens dkk., 2022). Akses terhadap proses legislasi, ruang deliberasi, dan pengambilan keputusan strategis juga tidak setara, sehingga kehadiran perempuan tidak otomatis bertransformasi menjadi pengaruh kebijakan substantif (Erikson & Josefsson, 2022; Haselmayer dkk., 2022). Kondisi ini memperkuat argumentasi teoretis bahwa representasi deskriptif (jumlah kehadiran) tidak selalu berkorelasi langsung dengan representasi substantif (pengaruh kebijakan).

Paradoks ini juga memperlihatkan bahwa peningkatan indikator gender lebih cepat terjadi di ranah pembangunan sosial dibanding politik elektoral. Negara relatif berhasil memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi perempuan melalui program pemberdayaan dan layanan publik, tetapi belum efektif mentransformasikannya menjadi kekuasaan representatif formal di parlemen. Dalam perspektif

gender and development, kondisi ini menunjukkan adanya jeda institusional (*institutional lag*) antara pemberdayaan sosial (Syukri, 2023) dan representasi politik (Sarangi dkk., 2023). Dengan kata lain, pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan telah mengalami kemajuan signifikan melalui akses kredit mikro, pelatihan keterampilan, dan pendidikan tinggi, namun hal ini tidak secara otomatis mengeliminasi hambatan struktural di ranah politik seperti bias rekrutmen partai, oligarki kekuasaan lokal, dan eksklusivitas jaringan patronasi (Junk dkk., 2021).

Lebih jauh, analisis ini mengungkap bahwa paradoks konversi juga diperparah oleh ketiadaan kebijakan afirmatif pascapencalonan yang dapat menjamin keterpilihan dan efektivitas perempuan legislator. Kebijakan afirmatif Indonesia saat ini hanya mengatur kuota pencalonan 30% dan *zipper system* dalam daftar calon, namun tidak mengatur alokasi kursi berdasarkan gender atau *positioning* strategis kandidat perempuan di daerah pemilihan (dapil) elektabel. Akibatnya, meskipun perempuan dicalonkan dalam jumlah memadai, mereka sering ditempatkan di nomor urut bawah atau dapil non-kompetitif, sehingga peluang keterpilihan menjadi sangat rendah (Amanda, 2025; Nasrudin & Yandi, 2025). Hal ini berbeda dengan negara-negara yang menerapkan *reserved seats* atau *legislated quotas* yang menjamin representasi minimum perempuan di parlemen terlepas dari hasil kompetisi elektoral.

Dengan demikian, diagnosa utama penelitian menegaskan bahwa kesetaraan gender di NTB masih berada pada fase *developmental equality*, belum mencapai tahap *political equality*. Fase *developmental equality* ditandai oleh perbaikan indikator sosial-ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan reproduksi, dan partisipasi ekonomi, namun belum diikuti transformasi struktural dalam distribusi kekuasaan politik. Sementara itu, *political equality* mensyaratkan tidak hanya kehadiran perempuan dalam jumlah memadai di parlemen, tetapi juga pengaruh substantif dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengambilan keputusan strategis. Tanpa reformasi rekrutmen partai yang menghapus bias gender, afirmasi elektoral strategis yang menjamin keterpilihan perempuan di dapil kompetitif, serta penguatan jejaring kepemimpinan perempuan melalui kaderisasi sistematis dan dukungan organisasi masyarakat sipil, konversi pembangunan gender ke representasi politik akan tetap berjalan lambat (Caprais dkk., 2020; Rambe, 2024). Oleh karena itu, diperlukan intervensi multidimensional yang tidak hanya fokus pada pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan, tetapi juga reformasi institusional partai politik, penguatan mekanisme afirmasi elektoral, dan transformasi kultur politik lokal menuju kesetaraan substantif.

4. Kesimpulan

Perkembangan IKG di Provinsi NTB periode 2019–2023 mengalami perbaikan bertahap, namun berlangsung tidak merata antarwilayah. Wilayah perkotaan memperlihatkan capaian kesetaraan gender yang relatif lebih progresif dibandingkan daerah agraris dan kepulauan. Di sisi lain, dinamika keterwakilan perempuan di parlemen daerah (DPRD) justru memperlihatkan kecenderungan stagnasi dengan variasi yang relatif sempit. Proporsi perempuan legislatif tidak mengalami peningkatan signifikan, bahkan pada wilayah yang mencatat penurunan ketimpangan gender dan kemajuan indikator gender. Sintesis kedua temuan tersebut mengungkap adanya disparitas konversi antara pembangunan gender dan representasi politik, dimana perbaikan kapasitas sosial-ekonomi perempuan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi penguatan posisi politik elektoral di DPRD. Kesetaraan gender di NTB masih berada pada fase pembangunan sosial, belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam struktur kekuasaan legislatif daerah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder yang belum mampu menangkap dinamika kualitatif seperti proses kaderisasi partai, negosiasi politik internal, maupun distribusi dukungan logistik terhadap kandidat perempuan. Selain itu, indikator keterwakilan yang digunakan masih berbasis kuantitas kursi dan belum mengukur kualitas peran legislasi, pengaruh dalam penganggaran, maupun kepemimpinan alat kelengkapan dewan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk

mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui wawancara elite politik, analisis jaringan kekuasaan partai, serta telaah kebijakan responsif gender berbasis dokumen APBD dan produk legislasi daerah.

Pada daerah dengan ketimpangan gender tinggi dan keterwakilan politik rendah, prioritas intervensi diarahkan pada penguatan kapasitas dasar perempuan melalui perluasan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta kaderisasi politik berbasis komunitas guna membangun fondasi elektabilitas jangka panjang. Sementara itu, pada wilayah yang telah menunjukkan perbaikan indikator gender namun representasi politik masih stagnan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada reformasi rekrutmen partai, afirmasi penempatan kandidat perempuan di daerah pemilihan strategis, serta dukungan logistik kampanye yang setara. Adapun pada wilayah dengan capaian representasi relatif lebih progresif, penguatan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan perempuan dalam proses legislasi dan penganggaran responsif gender. Dengan pendekatan simultan tersebut, pembangunan gender tidak berhenti sebagai capaian statistik, tetapi mampu dikonversi menjadi kekuatan representasi substantif perempuan dalam keterwakilan Perempuan dalam proses pengambilan keputusan di DPRD Provinsi NTB.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Drs. Herie Saksono, M.Si. atas masukan akademik, pandangan kritis, dan arahan konseptual yang berkontribusi signifikan dalam memperkaya perspektif analisis serta mempertajam argumentasi penelitian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari Karina Juniarti Utami atas bimbingan teknis, diskusi konstruktif, dan pendampingan akademik selama proses penyusunan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah ini. Seluruh isi dan kesimpulan artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Referensi

- Ahrens, P., Gaweda, B., & Kantola, J. (2022). Reframing the Language of Human Rights? Political Group Contestations on Women's and LGBTQI Rights in European Parliament Debates. *Journal of European Integration*, 44(6), 803–819. <https://doi.org/10.1080/07036337.2021.2001647>
- Alexis, T. Y., Daniel, N. N. Y., & Guivis, N. Z. (2020). A Spatial Analysis of Monetary and Non-monetary Poverty in Cameroon Between 2001 and 2014. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 8(4), 415–430. <https://doi.org/10.22437/ppd.v8i4.9929>
- Amanda, N. (2025). The Effect of Electoral System Reforms on Political Representation and Accountability in the Indonesian Legislative Elections. *Moccasin Journal De Public Perspective*, 2(4), 205–218. <https://doi.org/10.37899/mjdpp.v2i4.284>
- Apostu, S. A., Panait, M., Gigauro, I., & Blessinger, P. (2024). Exploring the Relationship Between the Urbanization, Higher Education and Female Labor Force With Sustainable Development. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 16(2), 427–445. <https://doi.org/10.1108/JARHE-11-2022-0368>
- Aulia, F. H., Cahyowati, RR., Rusnan, & Rahmadani. (2025). Pencalonan Anggota Perempuan dan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Diskresi*, 4(1), 32–49. <https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1.7389>
- Aziz, M. (2023). Women's Double Burden in the Family Between Culture and Discrimination. *Potret Pemikiran*, 27(2), 227–244. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP>
- Bayo, L. N. (2021). Women Who Persist: Pathways to Power in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 93–115. <https://doi.org/10.1177/1868103421989712>
- Blumenau, J. (2021). The Effects of Female Leadership on Women's Voice in Political Debate. *British Journal of Political Science*, 51(2), 750–771. <https://doi.org/10.1017/S0007123419000334>
- Caprais, A., Sabatier, F., & Rubi, S. (2020). Electoral Competition and Gender Quotas: Dearth of Female Applicants or Structural Resistance? *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(3), 349–364. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1782966>
- Dewi, K. H., Latifa, A., Subono, N. I., Prasetyawan, W., & Prasojo, A. P. S. (2023). "Dia Dikader": Women's NGOs Roles, Networks, and the Agency of Women's Legislative Candidates in West Sumatra. *Asian Journal of Women's Studies*, 29(4), 506–530. <https://doi.org/10.1080/12259276.2023.2285395>

- Dewi, K. H., Prasajo, A. P. S., Latifa, A., Prasetyawan, W., Widyawat, F., & Subono, N. I. (2025). Non-electoral Political Participation Among Members of Indonesian Women's NGOs: The Role of Gender Training, Social Bases, and Political Efficacy. *Asian Women*, 41(2), 43–74. <https://doi.org/10.14431/aw.2025.6.41.2.43>
- Erikson, J., & Josefsson, C. (2022). The Parliament as a Gendered Workplace: How to Research Legislators' (UN) Equal Opportunities to Represent. *Parliamentary Affairs*, 75(1), 20–38. <https://doi.org/10.1093/pa/gsaa049>
- Fitri, R. S. (2025). Konstruksi Sosial Identitas Gender dalam Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Sidodadi, Sidoarjo. *Journal of Politics and Democracy*, 4(2), 126–139. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v4i2.83>
- Fraga, B. L., & Hassell, H. J. G. (2021). Are Minority and Women Candidates Penalized by Party Politics? Race, Gender, and Access to Party Support. *Political Research Quarterly*, 74(3), 540–555. <https://doi.org/10.1177/1065912920913326>
- Goswami, I., Balakrishnan, S., Vinotha, C., Chopra, R., Sivakumar, V., & D. M., C. (2023). Gender And Politics: Examining Women's Representation and Empowerment. *Journal of Namibian Studies*, 33(3), 1980–1994.
- Gugan, S. S., Steward, J. J., & Subhashini, A. (2024). The Role of Women in Economic Development. *Shanlax International Journal of Economics*, 12(2), 94–103. <https://doi.org/10.34293/economics.v12i2.7211>
- Halimatusa'diyah, I., & Jannah, A. N. (2025). Understanding Hidden Layers in Political Participation: Women's Representation in Indonesia's Election Management Bodies. *Women's Studies International Forum*, 112. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103141>
- Haselmayer, M., Dingler, S. C., & Jenny, M. (2022). How Women Shape Negativity in Parliamentary Speeches—A Sentiment Analysis of Debates in the Austrian Parliament. *Parliamentary Affairs*, 75(4), 867–886. <https://doi.org/10.1093/pa/gsab045>
- Hendrastiti, T. K. (2025). *Circle of Influence: Sisterhood in Female Academia Networking*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://obor.or.id/%20circle-of-influence-sisterhood-in-female-academia-networking>
- Höhmman, D. (2020). When Do Men Represent Women's Interests in Parliament? How the Presence of Women in Parliament Affects the Legislative Behavior of Male Politicians. *Swiss Political Science Review*, 26(1), 31–50. <https://doi.org/10.1111/spsr.12392>
- Jovani, A. (2024). *Perempuan di Parlemen Lokal: Pengalaman dari Nusa Tenggara Timur*. Univeritas Kristen Indonesia Press. <http://repository.uki.ac.id/15479/>
- Junk, W. M., Romeijn, J., & Rasmussen, A. (2021). Is This a Men's World? On the Need to Study Descriptive Representation of Women in Lobbying and Policy Advocacy. *Journal of European Public Policy*, 28(6), 943–957. <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1767179>
- Kadriyah, S. M. (2023). Women's Representation and Accessibility in Indonesian Politics: A Study of Jakarta Regional People's Representative Council. *Jurnal Politik*, 9(2), 116–142. <https://doi.org/10.7454/jp.v9i2.1154>
- Kedu, L. D. M. G. (2023). Strategi Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilu Tahun 2024 [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/14301/>
- Khaddafi, M., Wibowo, H., Safitri, I., Nst, S. A. Z., & Salsabila, V. A. (2025). Analisis Penggunaan Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Akuntansi: Studi Literatur pada Jurnal Nasional Terakreditasi. *Jurnal Intellect dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 4025–4031. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/4353>
- Khotimah, I. R., Yunita, B. M. H., Utami, K. J., & Saksono, H. (2025). Akselerasi Motorisasi di Wilayah Kepulauan Lombok-Sumbawa: Evaluasi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor dan Tantangan Infrastruktur Transportasi Darat. *Aletheia: Jurnal Sosial & Humaniora, Inovasi, Ekonomi, dan Edukasi*, 2(1), 15–25. <https://doi.org/10.63892/aletheia.2.2025.15-25>
- Klasen, S., & Schüller, D. (2011). Reforming the Gender-Related Development Index and the Gender Empowerment Measure: Implementing Some Specific Proposals. *Feminist Economics*, 17(1), 1–30. <https://doi.org/10.1080/13545701.2010.541860>
- Kuki, E. N. (2024). *Strategi Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/17798/>
- Kumari, S., Nanduri, S., Sharma, H., & Batar, S. (2024). Women in Politics: Examining Their Impact on Policy Development — A Comprehensive Review. *Multidisciplinary Reviews*, 6, 1–9. <https://doi.org/10.31893/multirev.2023ss034>

- Lombard, E. J., Azpeitia, J., & Cheryan, S. (2021). Built on Uneven Ground: How Masculine Defaults Disadvantage Women in Political Leadership. *Psychological Inquiry*, 32(2), 107–116. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2021.1930776>
- Makmun, M., & Yandi, Y. (2025). An Analysis of Women's Representation in Parliament: A Comparative Study of Indonesia and Other Countries Around the World. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(6), 4620–4631. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2145>
- Nasrudin, R., Solihah, R., & Aziz, Y. M. (2025). Women's Representation in Regional Elections: Gendered Institutions' Perspective on Political Design and Practice. *Joels: Journal of Election and Leadership*, 6(2), 101–115. <https://doi.org/10.31849/aqz8m29>
- Nemerever, Z., & Parry, J. A. (2023). Does More Matter? Critical Mass and Legislative Influence. *Party Politics*, 29(6), 1161–1168. <https://doi.org/10.1177/13540688221144695>
- Neolaka, M. N. B. C., Tabun, S. D. S., & D.N.A.Benu, E. (2024). Gender and Strategic Political: Opportunities and Challenges for Women and Youth in Political Parties in East Nusa Tenggara Indonesia 2019. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(12), 1–23. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n12-227>
- Nurseha, I., & Arafat, F. (2024). Ketimpangan Gender dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, dan Konstruksi Sosial. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 4(02), 947–955. <https://doi.org/10.33754/masadir.v4i02.1343>
- Prihatini, E., & Halimatusa'diyah, I. (2024). Gender, Political Dynasties, and Committee Assignments: Evidence From Indonesia. *Parliamentary Affairs*, 77(1), 196–214. <https://doi.org/10.1093/pa/gjac019>
- Putri, S. R. (2025). Masculinity in Legal Structures and Women's Digital Economic Access: A Reflective Critique Based on the Gender Inequality Index (IGK) 2024. *Journal of Digital Business*, 1(1), 32–42. <https://jurnal.bisnislombok.ac.id/index.php/BDP/article/view/30/24>
- Rahmadani, N., Hasniati, & Najib, M. (2025). Dari Kuota ke Kuasa: Keterwakilan Perempuan di DPR-DPRD dalam Mewujudkan Keadilan Gender dalam Legislas. *Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review*, 5(2), 111–130. <https://doi.org/10.31332/qjclr.v5i2.12280>
- Rambe, D. S. (2024). Affirmative Actionrole And Participation Of Women 30% Representation In Political Parties and Parliament. *Isnu Nine-Star Multidisciplinary Journal*, 1(2), 51–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.70826/ins9mj.v1i2.99>
- Rohmawati, W. S. A. (2020). The Role of Women in Interreligious Dialogue in Indonesia: A Study on the Forum for Religious Harmony (FKUB). *The Muslim World*, 110(4), 572–588. <https://doi.org/10.1111/muwo.12362>
- Sarangi, S., Singh, R. K. R., & Thakur, B. K. (2023). Interrelationship Between Share of Women in Parliament and Gender and Development: A Critical Analysis. *Administrative Sciences*, 13(4), 1–15. <https://doi.org/10.3390/admsci13040106>
- Satris, R., & Sabilla, K. R. (2021). Influence of Women Political Participation in Parliament Correlates to Gender Issues in Indonesia. *Sociología Y Tecnociencia*, 11(1), 177–187. https://doi.org/10.24197/st.Extra_1.2021.177-187
- Shenbei, Z., Ajaz, A., Sarfraz, M., & Joo, N. A. (2023). New Insights Into the Rural Development Economies Under the Moderating Role of Gender Equality and Mediating Role of Rural Women Development. *Journal of Rural Studies*, 104(4). <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103166>
- Sijabat, S. G., Nailufar, F. D., & Saksono, R. N. A. (2023). Initiative in Active Representative Bureaucracy: Woman Leader in Nusa Tenggara Barat. *KnE Social Sciences*, 594–603. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13575>
- Sobri, A., & Noviani, D. (2023). Teori Darajat: Penyeimbang Double Burden. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(4), 87–102. <https://doi.org/10.59031/jkppk.v1i4.267>
- Sudarsono, A. B. (2024). *Politik Perempuan Perempuan Politik: Perjalanan Politik Perempuan di Indonesia*. Kreasi Cindika Pustaka.
- Syahri, M. S. R. U., Alqadri, B., & Hadi, M. S. (2025). Rendahnya Representasi Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Empiricism Journal*, 6(2), 770–786. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.2803>
- Syukri, M. (2023). Gender Policies of the New Developmental State: The Case of Indonesian New Participatory Village Governance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 110–133. <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>
- Terjesen, S., Aguilera, R. V., & Lorenz, R. (2015). Legislating a Woman's Seat on the Board: Institutional Factors Driving Gender Quotas for Boards of Directors. *Journal of Business Ethics*, 128(2), 233–251. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2083-1>
-

- Tohari, A., Uin, F., & Surabaya, S. A. (2025). Urban Poverty and Social Mobility: Challenges and Opportunities in Developing Cities. *The Journal of Academic Science*, 2(3), 762–771. <https://doi.org/https://doi.org/10.59613/q8yxeg84>
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian*, 25(1), 19–34. <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1886>
- van der Ham, M., Boliijn, R., de Vries, A., Campos Ponce, M., & van Valkengoed, I. G. M. (2021). Gender Inequality and the Double Burden of Disease in Low-Income and Middle-Income Countries: An Ecological Study. *BMJ Open*, 11(4), 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047388>
- Wijaya, M., Zahra, F. A., Amini, S. F., Nabilla, A., & Umniyah, U. Z. (2025). Kesetaraan dan Kebebasan Perempuan: Strategi Melawan Diskriminasi serta Ancaman Patriarki. *Jurnal Media Akademik*, 3(10), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/psmted18>
- Yarchi, M., & Samuel-Azran, T. (2018). Women Politicians Are More Engaging: Male Versus Female Politicians' Ability to Generate Users' Engagement on Social Media During an Election Campaign. *Information, Communication & Society*, 21(7), 978–995. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1439985>